



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 05 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013-2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa indikator kinerja pemerintah daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alir tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, penetapannya harus tepat sesuai kondisi yang diinginkan dalam rangka mengarahkan penyusunan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif selama 5 (lima) tahun;
  - b. bahwa target capaian indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2014 yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 tidak sesuai lagi dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tidak sesuai dengan perubahan organisasi perangkat daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013-2014.

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Gubernur ini dilakukan perubahan target indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2014 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016.

## **Pasal 2**

- (1) Perubahan target indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
  - a. perubahan target indikator kinerja tahun 2013 dan tahun 2014; dan
  - b. perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab target indikator kinerja.
- (2) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan perubahan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2013.

## **Pasal 3**

- (1) Perubahan target indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pada :
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c. Dinas Bina Marga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - d. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - e. Dinas Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - f. Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - g. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - i. Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - k. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - l. Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - m. Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - o. Rumah Sakit Umum Daerah Undata;
  - p. Rumah Sakit Umum Madani;
  - q. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - r. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - s. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - t. Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - u. Biro Administrasi Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - v. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - w. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - x. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - y. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - z. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - aa. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korpri Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sulawesi Tengah;
  - bb. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - cc. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - dd. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - ee. Kantor Pelayanan dan Perizinan terpadu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - ff. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- gg. Badan Ketahanan Pangan Daerah provinsi Sulawesi Tengah;
  - hh. Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - ii. Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - jj. Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - kk. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;  
dan
  - ll. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Target indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 20 Pebruari 2013

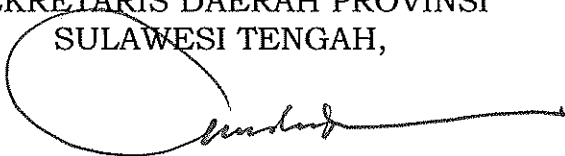
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 20 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 223

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 NOMOR 5 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 - 2014

TARGET INDIKATOR KINERJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013		2014		Ket
		TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH					
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>						
1	Pendidikan					
1.1	Angka Melek Huruf	97.69	96.15	98.23	96.18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	10.00	8.50	10.67	8.75	
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	113.79	102.00	114.36	101.50	
1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	95.09	88.00	97.61	90.00	
1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	81.23	69.00	83.13	71.00	
1.6	Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96.06	92.00	96.40	93.00	
1.7	Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	68.09	66.50	68.09	68.00	
1.8	Angka partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	75.29	50.00	78.25	53.00	
2	Kesehatan					Dinas Kesehatan Daerah
2.1	Angka usia harapan hidup	71.90	67.30	72.90	67.54	
2.2	Persentase balita gizi buruk	5.87	0.49	5.36	0.44	
3	Ketenagakerjaan					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.1	Rasio penduduk yang bekerja ( Bekerja per angkatan kerja)	0.97		0.98		
<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>						
1	Kebudayaan					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk (%)	230 sanggar	252 sanggar (0.96)	235 sanggar	260 sanggar (1,00)	
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	3 buah (0,01)		3 buah (0,01)		
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>						
<b>Pelayanan Urusan Wajib</b>						
1	Pendidikan					
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (persen)	97.91	97.75	98.04	98.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
1.1.2	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (persen)	88.51	86.50	89.96	87.50	
1.1.3	Rasio ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar (SD/MI) per 10.000 Penduduk Pendidikan Dasar (7-12 Tahun)	0.94	76.00	0.95	77.00	
1.1.4	Rasio ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar (SMP/MTs) per 10.000 Penduduk Pendidikan Dasar (13-15 Tahun)	0.29	63.75	0.31	64.00	
1.1.5	Perbandingan murid terhadap guru 1 SD (10000 murid)	12.03	148.00	11.68	148.50	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013		2014		Ket
		TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	
1.1.6	Perbandingan murid terhadap 1 guru SMP (10000 murid)	13.03	12.59	12.68	13.00	
1.1.7	Rasio guru sekolah pendidikan dasar (SD/MI) murid sekolah pendidikan dasar per kelas rata-rata	0.01	0.06	0.01	0.07	
1.1.8	Rasio guru sekolah pendidikan dasar (SMP/MTs) murid sekolah pendidikan dasar per kelas rata-rata	0.48	0.28	0.54	0.29	
1.1.9	Perbandingan jumlah guru dan murid dalam 1 kelas		1 ; 4.75 : 46.50		1 ; 5.00 : 45.00	
1.2	Pendidikan Menengah					
1.2.1	Angka partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK)	61.23	60.00	64.95	62.00	
1.2.2	Rasio ketersediaan Sekolah Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK) per 10.000 penduduk usia sekolah menengah	18.84	29.00	20.71	30.00	
1.2.3	Perbandingan murid terhadap 1 guru	11.51	11.51	11.34	11.34	
1.2.4	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	97.69	96.40	98.23	96.50	
1.3	Fasilitas pendidikan :					
1.3.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	66.20	55.00	70.67	57.50	
1.3.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	88.30	84.00	88.93	85.00	
1.3.3	Sekolah pendidikan SMA/MA kondisi bangunan baik	83.24	86.50	84.808	87.00	
1.3.4	Sekolah pendidikan SMK kondisi bangunan baik	90.97	90.97	93.018	93.02	
1.4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :					
1.4.1	PAUD (APK)	55.12	47.10	59.21	47.25	
1.5	Angka Putus Sekolah :					
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	1.57	1.57	1.382	1.35	
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1.47	10.00	0.988	9.00	
1.5.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	3.03	3.15	2.770952381	3.00	
1.6	Angka Kelulusan :					
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (persen)	97.13	97.00	97.4503	97.10	
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (persen)	98.91	95.50	98.918	96.00	
1.6.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (persen)	90.87	95.75	91.88	95.90	
1.6.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	86.79	86.00	91.192	86.50	
1.6.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	70.83	81.00	72.7562658	82.00	
1.6.6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	0.45	64.00	0.5	66.00	
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>					
2.1	Rasio Posyandu per satuan Balita (1000 balita)	20.89	12.13	26.12	12.97	Dinas Kesehatan Daerah
2.2	Rasio puskesmas per satuan penduduk (per 1.000 penduduk)	0.08	0.07	0.10	0.07	
2.3	Rasio pustu per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	0.37	0.29	0.48	0.31	
2.4	Rasio rumah sakit per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	0.01	0.01	0.02	0.01	
2.5	Rasio dokter gigi persatuan penduduk (per 1000 penduduk)	0.04	0.03	0.05	0.03	
2.6	Rasio dokter spesialis persatuan penduduk (per 1000 penduduk)	0.04	0.03	0.05	0.03	
2.7	Rasio dokter umum persatuan penduduk (per 1000 penduduk)	0.22	0.15	0.29	0.15	
2.8	Rasio tenaga medis (perawat) persatuan penduduk (per 1000	2.19	1.73	2.85	1.82	
2.9	Rasio tenaga medis (bidan) persatuan penduduk (per 1000	1.20	0.78	1.56	0.79	
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	0.75	100.00	0.85	100.00	
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang	0.83	85.24	0.86	86.39	
2.12	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	80.00		83.00		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013		2014		Ket
		TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (persen)	100		100		
2.14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	51.00	52.72	55.00	54.35	
2.15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100		100		
2.16	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	53	100.00	55.00	100.00	
2.17	Cakupan kunjungan Bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai SOP (persen)	88.00	96.22	90.00	97.84	
2.18	Jumlah Posyandu	3,249 posyandu	118.55	3,274 posyandu	119.86	
2.1.1	Perspektif Pelanggan					RSUD Undata
	a. Pertumbuhan <i>Customer Acquisition</i>	7%		10%		
	b. Pertumbuhan <i>Customer Loyalty</i>	85%		90%		
	c. Indeks Kepuasan Pelanggan	80%		85%		
2.1.2	Perspektif Proses Bisnis Internal					
	1. <i>Quality of Place</i>					
	a. <i>Bed Occupancy Rate</i>	65-70%		75-80%		
	b. <i>Bed Turn Over</i>	40-50x/tahun		40-50x/tahun		
	c. <i>Turn Over Interval</i>	1-3 hari		1-3 hari		
2.1.3	Quality of Service					
	a. <i>Gross Death Rate</i>	≤ 45%		≤ 45%		
	b. <i>Net Death Rate</i>	≤ 25%		≤ 25%		
	c. <i>Length of Stay</i>	3-7 hari		3-7 hari		
	d. Angka Kematian Bayi	≤ 20%		≤ 20%		
	e. Angka Kematian Ibu	0.25%		0.25%		
2.1.4	Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran					
	1. Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia					
	- Rata-rata jumlah karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan rumah sakit	20%		20%		
	2. Komitmen Kehadiran					
	- Tingkat kehadiran karyawan	≥ 98%		≥ 98%		
2.1.5	Perspektif Keuangan					
	a. Pertumbuhan Pendapatan	10%		10%		
	b. <i>Cost Recovery Ratio</i>	100%		100%		
	c. Tingkat Kemandirian Keuangan	50%		60%		
2.2.1	Pencapaian Indikator SPM Unit-Unit Pelayanan					RSD MADANI
	1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	100%	100%	
	2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	
	3. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD /GELS/ ALS	100%	100%	100%	100%	
	4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	
	5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat (terlayani setelah pasien datang)	< 5 menit	< 5 menit	< 5 menit	< 5 menit	
	6. Kepuasan Pelanggan	> 70 %	> 70 %	> 70 %	> 70 %	
	7. Kematian pasien < 24 jam (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam).	< 2 per seribu	< 2 per seribu	< 2 per seribu	< 2 per seribu	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013		2014		Ket
		TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	
	8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	
2.2.2	1. Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100 % Dokter Spesialis	
	2. Ketersediaan Pelayanan	a.Klinik Anak, b.Klinik Penyakit dalam, c.Klinik Kebidanan, d.Klinik Bedah, e. Klinik jiwa, f. Klinik Saraf, g. Klinik gigi	a.Klinik Anak, b.Klinik Penyakit dalam, c.Klinik Kebidanan, d.Klinik Bedah, e. Klinik jiwa, f. Klinik Saraf, g. Klinik gigi	a.Klinik Anak, b.Klinik Penyakit dalam, c.Klinik Kebidanan, d.Klinik Bedah, e. Klinik jiwa, f. Klinik Saraf, g. Klinik gigi	a.Klinik Anak, b.Klinik Penyakit dalam, c.Klinik Kebidanan, d.Klinik Bedah, e. Klinik jiwa, f. Klinik Saraf, g. Klinik gigi	
	3. Jam buka pelayanan :					
	- Setiap hari kerja	08.00 s/d 12.00	08.00 s/d 12.00	08.00 s/d 12.00	08.00 s/d 12.00	
	- Hari Jumat					
	4. Waktu tunggu di rawat jalan	< 60 menit	< 60 menit	< 60 menit	< 60 menit	
	5. Kepuasan Pelanggan	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %	
	6. a. Penegakan diagnosis Tb melalui pemeriksaan mikroskopis TB	> 60 %	> 60 %	> 60 %	> 60 %	
	b.Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	> 60 %	> 60 %	> 60 %	> 60 %	
2.2.3	1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap :					
	a. dr. Spesialis	100%	100%	100%	100%	
	b. Perawat minimal pendidikan D3	100%	100%	100%	100%	
	2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	
	3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak, b. Penyakit c. Kebidanan, d. Bedah e. Jiwa, f. Saraf	a. Anak, b. Penyakit dalam c. Kebidanan, d. Bedah e. Jiwa, f. Saraf	a. Anak, b. Penyakit c. Kebidanan, d. Bedah e. Jiwa, f. Saraf	a. Anak, b. Penyakit dalam c. Kebidanan, d. Bedah e. Jiwa, f. Saraf	
	4. Jam Visite Dokter Spesialis (08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja)	100%	100%	100%	100%	
	5. Kejadian infeksi pasca operasi	< 1,5 %	< 1,5 %	< 1,5 %	< 1,5 %	
	6. Kejadian Infeksi Nosokomial	< 1,5 %	< 1,5 %	< 1,5 %	< 1,5 %	
	7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%	100%	100%	
	8. Kematian pasien > 48 jam	< 0,24 %	< 0,24 %	< 0,24 %	< 0,24 %	
	9. Kejadian pulang paksa	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	
	10. Kepuasan pelanggan	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %	
	11. Rawat Inap TB	> 60 %	> 60 %	> 60 %	> 60 %	
	a. Penegakan diagnosa TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB					
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di	> 60 %	> 60 %	> 60 %	> 60 %	
2.2.4	1. Waktu tunggu operasi elektif	< 2 hari	< 2 hari	< 2 hari	< 2 hari	
	2. Kejadian kematian di meja operasi	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	
	3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013		2014		Ket
		TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	
	4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	
	5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	
	6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	
	7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube	< 6 %	< 6 %	< 6 %	< 6 %	
2.2.5	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan :					
	a. Pendarahan	<1 % ,	<1 % ,	<1 % ,	<1 % ,	
	b. Pre-eklampsia	< 30 % ,	< 30 % ,	< 30 % ,	< 30 % ,	
	c. Sepsis	< 0,2%	< 0,2%	< 0,2%	< 0,2%	
	2. Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter,	a. Dokter, Sp.OG	a. Dokter, Sp.OG	a. Dokter, Sp.OG	
		b. Dokter umum	b. Dokter umum	b. Dokter umum	b. Dokter umum	
		terlatih (Asuhan	terlatih (Asuhan	terlatih (Asuhan	terlatih (Asuhan	
		Persalinan	Persalinan	Persalinan	Persalinan	
		Normal]	Normal]	Normal]	Normal]	
		c. Bidan	c. Bidan	c. Bidan	c. Bidan	
	3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK	Tim PONEK	Tim PONEK	Tim PONEK	
		yang terlatih	yang terlatih	yang terlatih	yang terlatih	
	4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp.OG	a. Dokter Sp.OG ,	a. Dokter Sp.OG ,	a. Dokter Sp.OG ,	
		b. Dokter Sp.A ,	b. Dokter Sp.A ,	b. Dokter Sp.A ,	b. Dokter Sp.A ,	
		c. Dokter Sp.An.	c. Dokter Sp.An.	c. Dokter Sp.An.	c. Dokter Sp.An.	
	5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	100%	100%	100%	
	6. Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria	< 20 %	< 20 %	< 20 %	< 20 %	
	7. Keluarga Berencana/Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr. Sp.OG, dr. Sp.B, dr. Sp.U, dr. Umum terlatih	100%	100%	100%	100%	
	8. Kepuasan Pelanggan	>80 %	>80 %	>80 %	>80 %	
2.2.6	1. Rata-rata Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	
	2. Pemberi pelayanan Unit Intensif :					
	a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis	sesuai dengan kasus	sesuai dengan kasus	sesuai dengan kasus	sesuai dengan kasus	
		yang ditangani	yang ditangani	yang ditangani	yang ditangani	
	b. Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/ setara (D4)	100%	100%	100%	100%	
2.2.7	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	< 3 jam	< 3 jam	< 3 jam	< 3 jam	
	2. Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Rad	Dokter Sp.Rad	Dokter Sp.Rad	Dokter Sp.Rad	
		100%	100%	100%	100%	
	3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan foto	Kerusakan foto	Kerusakan foto	Kerusakan foto	
		< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	
	4. Kepuasan pelanggan	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013		2014		Ket
		TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	
2.2.8	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	< 140 menit	< 140 menit	< 140 menit	< 140 menit	
		Kimia drh & drh rutin	Kimia drh & drh rutin	Kimia drh & drh rutin	Kimia drh & drh rutin	
	2. Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK	Dokter Sp.PK	Dokter Sp.PK	Dokter Sp.PK	
		100%	100%	100%	100%	
	3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	
	4. Kepuasan pelanggan	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	
2.2.9	1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	< 50 %	< 50 %	< 50 %	< 50 %	
	2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%	
	3. Kepuasan Pelanggan	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	
2.2.10	1. Waktu tunggu pelayanan					
	a. Obat jadi	a.< 30 menit	a.< 30 menit	a.< 30 menit	a.< 30 menit	
	b. Obat Racikan	b.< 60 menit	b.< 60 menit	b.< 60 menit	b.< 60 menit	
	2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	
	3. Kepuasan pelanggan	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	
	4. Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	100%	100%	
2.2.11	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %	
	2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	< 20 %	< 20 %	< 20 %	< 20 %	
	3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	100%	100%	
2.2.12	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai	100%	100%	100%	100%	
	2. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi	100%	100%	100%	100%	
	3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	< 10 menit	< 10 menit	< 10 menit	< 10 menit	
	4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	
2.2.13	Pencapaian Indikator SPM Unit-Unit Pendukung Pelayanan					
	1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse	100% terpenuhi	100% terpenuhi	100% terpenuhi	100% terpenuhi	
	2. Kejadian Reaksi transfusi	< 0,01 %	< 0,01 %	< 0,01 %	< 0,01 %	
2.2.14	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	100%	100%	100%	
		terlayani	terlayani	terlayani	terlayani	
2.2.15	1. Baku mutu limbah cair :					
	a. BOD	a. < 30 mg/l,	a. < 30 mg/l,	a. < 30 mg/l,	a. < 30 mg/l,	
	b. COD	b. < 80 mg/l,	b. < 80 mg/l,	b. < 80 mg/l,	b. < 80 mg/l,	
	c. TSS	c. < 30 mg/l,	c. < 30 mg/l,	c. < 30 mg/l,	c. < 30 mg/l,	
	d. PH	d. 6 - 9	d. 6 - 9	d. 6 - 9	d. 6 - 9	
	2. Pengelolaan limbah padat infeksius dengan aturan	100%	100%	100%	100%	
2.2.16	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	100%	100%	
	2. Kelengkapan laporan Akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%	
	3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	
	4. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	
	5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	> 60 %	> 60 %	> 60 %	> 60 %	
	6. Cost recovery	> 40 %	> 40 %	> 40 %	> 40 %	
	7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	
	8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013		2014		Ket
		TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	
7.5	Jumlah Pelabuhan Udara	5	5	7	7	
7.6	Jumlah Terminal Bus	47	47	47	47	
7.7	Angkutan Darat					
	- AKDP	374	374	392	392	
	- AKAP	95	95	99	99	
7.8	Kepemilikan KIR angkutan umum	32,390	32,390	35,630	35,630	
7.9	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	6	6	6	6	
7.10	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum :	65,000	65,000	65,000	65,000	
7.11	Pemasangan Rambu-rambu	3,258	3,258	2,594	2,594	
<b>9</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
9.1	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah terhadap seluruh pekerja wanita (%)		17.67		19.12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah
9.2	Partisipasi perempuan dilembaga swasta terhadap seluruh pekerja perempuan (%)		85.28		85.66	
9.3	Rasio KDRT					
9.4	Persentase Jumlah tenaga kerja di bawah umur		56.15		55.80	
9.5	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan		52.75		51.99	
<b>10</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>					
10.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (jiwa)		3		2.95	
10.2	Rasio akseptor KB baru per jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) (%)		19.00		19.55	
10.3	Cakupan peserta KB aktif per pasangan usia subur (%)		76.35		77.79	
	Keluarga Pra sejahtera dan keluarga Sejahtera I (persen)		49.55		48.55	
<b>11</b>	<b>Sosial</b>					
11.1	Sarana sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti	2.00	137	2.00	139	Dinas Sosial Daerah
11.2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial terhadap jumlah PMKS keseluruhan dalam persen (data dapat dipenuhi dengan jumlah PMKS dalam orang)					Dinas Sosial Daerah
	- Program Keluarga Harapan (PKH)	7,000 RTSM	7,000 RTSM	8,000 RTSM	8,000 RTSM	
	- Anak terlantar	220 ORG	2650 org	300 ORG	2850 org	
	- Penyandang cacat	100 ORG	1000 org	120 ORG	1025 org	
	- Lanjut Usia	300 org	511 org	350 org	536 org	
	- Keluarga Rentan Sosial	400 KK	1500 KK	450 KK	1500 KK	
	- Komunitas Adat Terpencil (KAT)	150 KK	770 KK	150 KK	820 KK	
	- Yang mendapatkan Rumah		315 UNIT		365 UNIT	
	- Yang Mendapatkan Jaminan Hidup	1,084 orang	1700 ORG	1522 ORG	2200 ORG	
	- Tuna Sosial	100 ORG	430 ORG	180 ORG	480 ORG	
	- Pekerja Migran	100 ORG	50 ORG	150 ORG	50 ORG	
11.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam Program per Kegiatan	3 program / 16 kegiatan	3 prog / 16 kegiatan	3 program / 16 kegiatan	3 prog / 16 kegiatan	
<b>12</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>					
12.1	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun (per 1000)	9,56		9,53		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013		2014		Ket
		TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	
12.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja ( Persen) angkatan kerja/pendidikan usia kerja	74		75.21		
12.3	Pencari kerja yang ditempatkan (Persen) pencari kerja yang	6000 org	31,19	7000 org	33,52	
12.4	Tingkat pengangguran terbuka (Persen)	4.11		4.01		
12.5	Keselamatan dan perlindungan (Persen)	92		94		
12.6	Rasio Ketergantungan :	75,6		73,8		
	- Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	3000		3500		
	- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis	482		419		
	- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis	453		505		
<b>13</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>					
13.1	Persentase koperasi aktif (Persen)	71,90%		73,70%		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
13.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Kegiatan Usaha)	697.934 unit	689.000 unit	715.382 unit	697.500 unit	
13.3	Jumlah BPR/LKM (Kegiatan Usaha)	80 LKM	75 LKM	95 LKM	80 LKM	
13.4	Usaha mikro dan kecil per Seluruh UKM (Persen)	81.62%	96.98%	83.66%	97.00%	
<b>14</b>	<b>Penanaman Modal</b>					
14.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Perusahaan)	5	73	5	86	Badan Promosi dan Penanaman Modal
14.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)(Rp)	1,466,994,280.32	4,088,736,155,805	1,760,393,136.38	4,105,636,155,805	
14.3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA USD\$)	18,144,000	3,931,636,522	21,772,800	4,242,458,744	
<b>15</b>	<b>Kebudayaan</b>					
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (even)	16 Kali	17 Kali	17 Kali	17 Kali	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (sarana)	17 Buah	18 Buah	18 Buah	18 Buah	
15.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15 Situs/BCB		17 Situs/BCB		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
	- Situs	279	0,062	281	0,066	
	- Benda Cagar Budaya (BCB)	1303	0,082	1305	0,082	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
	- Kawasan Cagar Budaya	1	1	1	1	
<b>16</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>					
16.1	Jumlah Organisasi Kepemudaan (klub)	127	0.13	130	0.13	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah
16.2	Jumlah Organisasi Olahraga (klub)	41	0.04	43	0.04	
16.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	7	0.01	7	0.01	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah
16.4	Jumlah Kegiatan Olahraga	16	0.02	16	0.02	
16.5	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) (tempat)	1	0.00	1	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah
16.6	Lapangan Olahraga (tempat)	33.00	0.01	34	0.01	
<b>17</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>					
17.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	7 kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
<b>18</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>					
18.1	Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk (%)	10.92%	109.02	11.65%	99.73	SATPOL PP
18.2	Pengelolaan keuangan daerah dengan predikat	WTP		WTP		BPKAD
18.3	Persentase penyelesaian Hasil temuan serta meningkatnya peran	70%	75%	75%	80%	SATPOL PP
18.4	Rancangan Produk Hukum yang disusun	- 13 Raperda	- 13 Raperda	- 14 Raperda	- 14 Raperda	BIRO HUKUM
		- 30 Pergub	- 30 Pergub	- 35 Pergub	- 35 Pergub	BIRO HUKUM
		- 265 Keppub	- 265 Keppub	- 265 Keppub	- 265 Keppub	BIRO HUKUM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013		2014		Ket
		TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	
18.5	Persentase peningkatan Pengelolaan, Pengamanan dan Pemanfaatan Barang/Aset serta pedapatan asli daerah	75	45	85	50	BPKAD
18.6	Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Persandian	75	50	85	50	
18.7	Terbitnya Rekomendasi Penataan Kelembagaan Prov, Kab/ Kota	13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	Biro Organisasi
18.8	Laporan Kinerja Provinsi yang dihasilkan	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	Biro Organisasi
18.9	Sosialisasi aturan peningkatan pelayanan publik kepada pegawai	60 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	Biro Organisasi
18.10	Pengukuran kinerja dan penataan SKPD Provinsi	10 SKPD	11 Kab/ Kota	10 SKPD	11 Kab/ Kota	Biro Organisasi
18.11	Dokumen Area Perubahan Reformasi Birokrasi	40 Dok	40 Dok	40 Dok	40 Dok	Biro Organisasi
18.12	Persentase rata-rata capaian kinerja Lingkup Sekretariat Daerah	50%		60%		Biro Administrasi Kesejahteraan dan Pembangunan dan Sumber Daya Alam
18.13	Persentase pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah secara	50 %	60%	75 %	75 %	
18.14	Optimalisasi pemanfaatan potensi SDA se Sulteng	80%		90%		
18.15	Jumlah Pelayanan dan Koordinasi Kerukunan dan Pelayanan Hidup		7 Dok		7 Dok	Biro Administrasi Kesejahteraan dan Administrasi Kemasyarakatan
18.16	Jumlah pelayanan Bidang KESRA		6 Dok		6 Dok	Biro Administrasi Kesejahteraan dan Administrasi Kemasyarakatan
18.17	Jumlah Dokumen pelayanan di bidang sosial kemasyarakatan		4 Dok		4 Dok	Biro Administrasi Kesejahteraan dan Administrasi Kemasyarakatan
18.18	Jumlah Dokumen koordinasi Kesramas		2 Dok		2 Dok	Biro Administrasi Kesejahteraan dan Administrasi Kemasyarakatan
18.19	Jumlah Fasilitas / Koordinasi	128		141		Biro Perekonomian
18.20	Jumlah koordinasi,fasilitasi dan Monev penyelenggaraan	80	80	85	85	Biro Administrasi Pemerintahan
18.21	Jumlah penanganan /penegasan batas daerah dan sengketa tanah	80	80	85	85	
18.22	Jumlah koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi dan pengembangan jaringan data kependudukan	80	80	85	85	
18.23	Jumlah koordinasi, fasilitasi perangkat dan pengembangan daerah otonomi baru serta kawasan khusus	80	80	85	85	Biro Administrasi Otonomi Daerah
18.24	Terlaksananya pelayanan secara Prima dan merata serta terbitnya agenda pemerintahan daerah	100 kali	95%	120 kali	97%	Biro Humas dan Protokol
18.25	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data informasi publik dan penyebarluasan informasi serta dokumentasi kegiatan	6 dokumen	200 buku profil	8 dokumen	300 buku profil	Biro Humas dan Protokol
			150 Buku saku		200 Buku saku	Biro Humas dan Protokol
			10 Kab/ 1 Kota		10 Kab/ 1 Kota	Biro Humas dan Protokol
			2 Kab pertunjukan		3 Kab pertunjukan	Biro Humas dan Protokol
			60 Buku derap langkah		150 Buku derap langkah	Biro Humas dan Protokol
			60 Buku dinamika		150 Buku dinamika	Biro Humas dan Protokol
			500 cetak brosur		1000 cetak brosur	Biro Humas dan Protokol
			97%		97%	Biro Humas dan Protokol
18.26	Terlaksananya kerjasama dengan mass media		30 mas media		30 mas media	Biro Humas dan Protokol
18.27	Produk-produk Dewan yg diimplementasikan	60 Keputusan	60 Keputusan	60 Keputusan	60 Keputusan	Sekretariat DPRD
18.28	Draf PERDA inisiatif yang dihasilkan	3 Draf Perda	3 Draf Perda	3 Draf Perda	3 Draf Perda	Sekretariat DPRD
18.29	Jumlah Target PAD (Rp 000)	643,380	611,928,145,945	774,900	703,717,367,837	Dinas Pendapatan Daerah
18.30	Persentase Koordinasi kerjasama program LITBANG	13,64 %	31,82%	18,18%	49,90%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
18.31	Survey dan riset pembangunan daerah yang dihasilkan	13 Dok	11 DOK	15 Dok	17 DOK	
18.32	Riset, pengembangan iptek sumberdaya yang ditindaklanjuti serta dimanfaatkan untuk pembangunan	9 DOK	24 DOK	11 DOK	28 DOK	
18.33	Laporan Hasil Pemeriksaan	245 LHP	245 LHP	245 LHP	245 LHP	Inspektorat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013		2014		Ket
		TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	
18.34	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	10 LHP	10 LHP	12 LHP	12 LHP	Inspektorat Daerah
18.35	Persentase					Inspektorat Daerah
18.36	penyelesaian Tindak Lanjut Hasil temuan					Inspektorat Daerah
	- BPK	60%	60%	65%	65%	
	- Inpektorat Jenderal	80%	80%	80%	80%	
	- Inspektorat	80%	80%	80%	80%	
18.37	Tersusunnya Peta Pengawasan di Prov. Sulteng	1 Peta	1 Peta Pengawasan	1 Peta	1 Peta Pengawasan	Inspektorat Daerah
18.38	Tersusunnya LHE Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	11 LHE	11 LHE	11 LHE	11 LHE	Inspektorat Daerah
18.39	Terlatihnya Aparatur Pengawasan	86 Org	86 Org	86 Org	86 Org	Inspektorat Daerah
18.40	Tersusunnya Sistem Prosedur Pengawasan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Inspektorat Daerah
18.41	Tersusunnya Investarisasi Pengaduan Masy dan Laporan Inpres No	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Inspektorat Daerah
18.42	Pengelolaan kekayaan seni dan budaya		4 Pagelaran		4 Pagelaran	Perwakilan Pemda Sulteng
18.43	Pengelolaan keuangan daerah dengan predikat	WTP		WTP		BPKAD
18.44	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitas,dibina,diseleksi dan diatur administrasi kepegawaiannya	- 1026 jabatan	- 1137 jabatan	- 1026 jabatan	- 1137 jabatan	Badan Kepegawaian Daerah
18.45	TUBEL	- 42Tubel	- 42Tubel	- 52Tubel	- 52Tubel	
	UJIAN DINAS	- 400 PNS	- 400 SK UD	- 450 PNS	- 450 SK UD	
	PI	- 320 PNS	- 320 SK PI	- 320 PNS	- 320 SK PI	
	DISIPLIN	- 10 Kasus	- 10 Kasus	- 9 Kasus	- 9 Kasus	
	SELEKSI	- 300 CPNS	- 968 CPNS	- 300 CPNS	- 610 CPNS	
	IPDN	- 30 Capra IPDN	- 30 Capra IPDN	- 30 Capra IPDN	- 32 Capra IPDN	
	DATA	- 6693 data	- 8 data statistik	- 6679 data	- 8 data statistik	
	BULETIN	1 buletin kepegawaian	1 buletin kepegawaian	1 buletin kepegawaian	1 buletin kepegawaian	
	PANGKAT MUTASI	2500 SK Pangkat - 100 SK	2500 SK Pangkat - 650 SK Mutasi	2500 SK Pangkat - 100 SK	2500 SK Pangkat - 620 SK Mutasi	
	PENSIUN	- 274 Pensiun	- 247 SK Pensiun	- 296 SK Pensiun	- 279 SK Pensiun	
	KESRA	- 650 PNS	- 550 PNS	- 650 PNS	- 1268 PNS	
18.45	Jumlah Pejabat Esselon II yang memenuhi kompetensi dalam	2 PNS	2 PNS	2 PNS	3 PNS	
18.46	Terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang efisien dan efektif					Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu
	- Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan	175 Izin		180 Izin		
18.47	Lamanya proses perizinan					
	- sektor izin ekonmi	1-40 hari	1-30 Hari	1-30 hari	1-20 Hari	Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu
	-sektor izin Pemerintahan	1-6 hari	1-5 Hari	1-5 hari	1-3 hari	
	- sektor izin kesra	1-40 hari	1-25 Hari	1-35 hari	1-25 Hari	
	- sektor izin Pembangunan	1-30 hari	1-15 Hari	1-25 hari	1-12 Hari	
18.48	Meningkatnya hal-hal terhadap					Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu
18.49	- Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	62.51% 81.25%		62.51% 81.25%		
	Sosialisasi hukum bidang penyiaran	7 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
18.49	Tercapainya Komunikasi dan Hubungan Masyarakat		35%		40%	Sekretariat DPP KORPRI
18.50	Meningkatnya Pemahaman paradigma KORPRI	70%	65%	75%	77%	Sekretariat DPP KORPRI
18.51	jumlah Cab. Olah raga yang diikuti /kontigen PORNAS /	134 Org	134 Org	8	8	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013		2014		Ket
		TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	
18.52	PORDA KORPRI	PORNAS	PORNAS	Cab Olah Raga	Cab Olah Raga	Sekretariat DPP KORPRI
18.53	Aksi / Bhakti Sosial yang dilakukan	4 Aksi Sosial	4 Aksi Sosial	6 Aksi Sosial	6 Aksi Sosial	Sekretariat DPP KORPRI
18.54	Bina Usaha Korpri yang dijalankan					Sekretariat DPP KORPRI
18.55	Ketersediaan tenaga penyuluh pertanian	920	1,551	997	1,619	BAKORLUH
18.56	Ketersediaan tenaga penyuluh perikanan	84	190	101	210	BAKORLUH
18.57	Ketersediaan tenaga penyuluh kehutanan	139	140	167	170	BAKORLUH
19	<b>Ketahanan Pangan</b>					
19.1	Regulasi ketahanan pangan	1 Pergub		2 Pergub		Badan Ketahanan Pangan
19.2	Ketersediaan pangan utama per jumlah penduduk (persen)	152,9		159,85		
20	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
20.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) terhadap LPM (kelompok)	80 Orang	20.88	120 Orang	20.34	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah
20.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK terhadap total (kelompok)	11 kelompok	20.88	11 kelompok	20.34	
20.3	Jumlah LSM	11 LSM	11	11 LSM	11	
20.4	LPM berprestasi	6 desa / 6 kel	5.05	6 desa / 6 kel	4.63	
20.5	PKK aktif	11 kab/kota	11 Kab/Kota	11 kab/kota	11 Kab/Kota	
20.6	Posyandu aktif (persen)	43%	20.68	50%	22.07	
20.7	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100%	Ada	100%	Ada	
20.8	Pemeliharaan Paska program pemberdayaan masyarakat (persen)	100%	100.00	100%	100.00	
21	<b>Kearsipan</b>					
21.1	Pengelolaan arsip secara baku (jumlah SKPD yang telah menerapkan Arsip secara Baku per Jumlah SKPD dalam persen)	0.59	51.13	0.70	53.21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
21.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	45 Arsiparis	45.00	50 Arsiparis	50.00	
22	<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
22.1	Jumlah surat kabar nasional/lokal	3 / 16	3 / 16	3 / 16	3 / 16	Dinas Komunikasi dan Informatika
22.2	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	21 / 3 / 6	21 / 3 / 6	21 / 3 / 6	21 / 3 / 6	
22.3	Web site milik pemerintah daerah	10	10	10	10	
23	<b>Perpustakaan</b>					
23.1	Jumlah perpustakaan		1978		2133	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
23.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (ribuan orang)		350.55		354.26	
23.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (ribuan buku)		224.20		244.17	
<b>Pelayanan Urusan Pilihan</b>						
1	<b>Pertanian</b>					
1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Kwintal per Hektar)					Dinas Pertanian
	Padi	55.25	48.94	59.96	50.79	
	Jagung	43.84	42.24	46.03	43.74	
	Kedelai	15.35	14.82	16.11	14.97	
	Kacang tanah	18.87	16.98	19.82	17.98	
	Kacang hijau	9.21	8.88	9.67	9.38	
	Ubi kayu	214.3	204.06	225.02	207.06	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013		2014		Ket
		TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	
	Ubi jalar	119.6	109.15	125.58	110.4	
1.2	Kontribusi total sektor pertanian terhadap PDRB (Persen)	37.65		36.51		
1.3	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (Persen)	11.49		11.4		
1.4	Cakupan bina kelompok tani (Persen)	65.01		68.27		
<b>2</b>	<b>Kehutanan</b>					
2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Persen)	13.03		12.25		Dinas Kehutanan
2.2	Kerusakan kawasan hutan (Persen)	0.005	0.04%	0.004	0.04%	
2.3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (Persen)	3.64	3.64	3.71	3.71	
<b>3</b>	<b>Perkebunan</b>					
3.1	Produktivitas perkebunan (ton/ha)					Dinas Perkebunan
	kakao	1.00	1.05	1.05	1.14	
	karet	1.69	1.26	1.76	1.29	
	kopi	0.99	0.98	1.00	1	
	jambu mete	0.4	0.36	0.45	0.37	
	kelapa sawit	15.5	17.36	15.75	17.88	
	cengkeh	0.99	0.27	1.02	0.28	
	kelapa	1.42	1.25	1.46	1.27	
	Pala	0.00	0.20	0.00	0.00	
<b>4</b>	<b>Peternakan</b>					
4.1	Jumlah populasi ternak besar (ekor sapi)	257,707	-	261,362	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.2	Jumlah konsumsi daging (Kg/th)	5.85	7.1	5.9	7.58	
<b>5</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>					
5.1	Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	88.51	90	91.2	92	Dinas Energi Sumber Daya Mineral Daerah
5.2	Pertambangan Tanpa Izin (%)	49,92	50	66,56	67	
5.3	Kontribusi sektor Pertambangan Terhadap PDRB	5.06	6.76	5.73	7.26	
<b>6</b>	<b>Pariwisata</b>					
6.1	Jumlah Kunjungan Wisata (indikator baru)	1,850,000	1,854,264	1,950,000	1,941,347	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6.2	Kunjungan wisatawan asing (Orang)	8,000	8,364	9,000	8,728	
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (persen)					
	Persentase Jumlah Restaurant menurut jenis dan kelas (persen) :	383	387	393	397	
	- Restaurant	161	163	168	171	
	- Rumah Makan	222	224	225	226	
	Jumlah Penginapan /Hotel	269	272	276	280	
	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel :	269	272	276	280	
	- Hotel Berbintang	6		6		
	- Melati	136	138	140	142	
	- Penginapan/Losmen/Wisma	127	128	130	132	
<b>7</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>					
7.1	Produksi perikanan tangkap (ton)	153,930.38	153,930.38	154,997.54	154,997.54	Dinas Kelautan dan Perikanan
7.2	Konsumsi ikan (Persen)	41.33	41.33	43.39	43.39	
7.3	Cakupan bina kelompok nelayan (Persen)	25.68	25.68	26.85	26.85	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013		2014		Ket
		TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	
7.4	Produksi perikanan kelompok nelayan ( Persen)	0.13	0.13	0.14	0.14	
8	<b>Perdagangan</b>					
8.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB ( Persen)	13,10%	12,10%	13,07%	12,15%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
8.2	Nilai Ekspor bersih perdagangan (Juta USD)	362,927	343,800	381,074	350,040	
8.3	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi (Persen)	15.71%	3.00%	18.85%	3.02%	
9	<b>Perindustrian</b>					
9.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Persen)	6,57%		7,15%		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
9.2	Pertumbuhan industri(Persen)	2.37%		2.43%		
9.3	Cakupan bina kelompok pengrajin (Persen)	13.75%	18.00%	16.50%	19.00%	
10	<b>Ketransmigrasian</b>					
10.1	Transmigrasi Swakarsa (Persen)	-		-		
10.2	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB ( Persen)		0,18		0,24	
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>						
<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>						
1	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>					
1.1	Persentase Desa Berstatus Swasemba terhadap Total Desa	30 Desa	30 Desa	30 Desa	30 Desa	
2	<b>Pertanian</b>					
2.1	NTP Pangan	87.54		91.79		Dinas Pertanian
2.2	NTP Hortikultura	104.43		105.68		Dinas Pertanian
2.3	Nilai tukar petani kebun	101.44	101.44	102.85	102.85	Dinas Perkebunan
2.4	NTP Perternakan	100		100	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.5	NTP perikanan		108.00		109.00	DKP

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	b
BAPPEDA	Y

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013		2014		Ket
		TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	
7.4	Produksi perikanan kelompok nelayan ( Persen)	0.13	0.13	0.14	0.14	
8	<b>Perdagangan</b>					
8.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB ( Persen)	13,10%	12,10%	13,07%	12,15%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
8.2	Nilai Ekspor bersih perdagangan (Juta USD)	362,927	343,800	381,074	350,040	
8.3	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi (Persen)	15.71%	3.00%	18.85%	3.02%	
9	<b>Perindustrian</b>					
9.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Persen)	6,57%		7,15%		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
9.2	Pertumbuhan industri(Persen)	2.37%		2.43%		
9.3	Cakupan bina kelompok pengrajin (Persen)	13.75%	18.00%	16.50%	19.00%	
10	<b>Ketransmigrasian</b>					
10.1	Transmigrasi Swakarsa (Persen)	-		-		
10.2	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB ( Persen)		0,18		0,24	
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>						
<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>						
1	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>					
1.1	Persentase Desa Berstatus Swasemba terhadap Total Desa	30 Desa	30 Desa	30 Desa	30 Desa	
2	<b>Pertanian</b>					
2.1	NTP Pangan	87.54		91.79		Dinas Pertanian
2.2	NTP Hortikultura	104.43		105.68		Dinas Pertanian
2.3	Nilai tukar petani kebun	101.44	101.44	102.85	102.85	Dinas Perkebunan
2.4	NTP Perternakan	100		100	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.5	NTP perikanan		108.00		109.00	DKP

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013		2014		Ket
		TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	
7.4	Produksi perikanan kelompok nelayan ( Persen)	0.13	0.13	0.14	0.14	
8	<b>Perdagangan</b>					
8.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB ( Persen)	13,10%	12,10%	13,07%	12,15%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
8.2	Nilai Ekspor bersih perdagangan (Juta USD)	362,927	343,800	381,074	350,040	
8.3	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi (Persen)	15.71%	3.00%	18.85%	3.02%	
9	<b>Perindustrian</b>					
9.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Persen)	6,57%		7,15%		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
9.2	Pertumbuhan industri(Persen)	2.37%		2.43%		
9.3	Cakupan bina kelompok pengrajin (Persen)	13.75%	18.00%	16.50%	19.00%	
10	<b>Ketransmigrasian</b>					
10.1	Transmigrasi Swakarsa (Persen)	-		-		
10.2	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB ( Persen)		0,18		0,24	
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>						
<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>						
1	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>					
1.1	Persentase Desa Berstatus Swasemba terhadap Total Desa	30 Desa	30 Desa	30 Desa	30 Desa	
2	<b>Pertanian</b>					
2.1	NTP Pangan	87.54		91.79		Dinas Pertanian
2.2	NTP Hortikultura	104.43		105.68		Dinas Pertanian
2.3	Nilai tukar petani kebun	101.44	101.44	102.85	102.85	Dinas Perkebunan
2.4	NTP Perternakan	100		100		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.5	NTP perikanan		108.00		109.00	DKP

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	
BAPPEDA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013		2014		Ket
		TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	
7.4	Produksi perikanan kelompok nelayan ( Persen)	0.13	0.13	0.14	0.14	
8	<b>Perdagangan</b>					
8.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB ( Persen)	13,10%	12,10%	13,07%	12,15%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
8.2	Nilai Ekspor bersih perdagangan (Juta USD)	362,927	343,800	381,074	350,040	
8.3	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi (Persen)	15.71%	3.00%	18.85%	3.02%	
9	<b>Perindustrian</b>					
9.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Persen)	6,57%		7,15%		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
9.2	Pertumbuhan industri(Persen)	2.37%		2.43%		
9.3	Cakupan bina kelompok pengrajin (Persen)	13.75%	18.00%	16.50%	19.00%	
10	<b>Ketransmigrasian</b>					
10.1	Transmigrasi Swakarsa (Persen)	-		-		
10.2	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB ( Persen)		0,18		0,24	
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>						
<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>						
1	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>					
1.1	Persentase Desa Berstatus Swasemba terhadap Total Desa	30 Desa	30 Desa	30 Desa	30 Desa	
2	<b>Pertanian</b>					
2.1	NTP Pangan	87.54		91.79		Dinas Pertanian
2.2	NTP Hortikultura	104.43		105.68		Dinas Pertanian
2.3	Nilai tukar petani kebun	101.44	101.44	102.85	102.85	Dinas Perkebunan
2.4	NTP Perternakan	100		100	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.5	NTP perikanan		108.00		109.00	DKP

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2013		2014		Ket
		TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	TARGET RPJMD	PENAMBAHAN TARGET	
7.4	Produksi perikanan kelompok nelayan ( Persen)	0.13	0.13	0.14	0.14	
8	<b>Perdagangan</b>					
8.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB ( Persen)	13,10%	12,10%	13,07%	12,15%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
8.2	Nilai Ekspor bersih perdagangan (Juta USD)	362,927	343,800	381,074	350,040	
8.3	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi (Persen)	15.71%	3.00%	18.85%	3.02%	
9	<b>Perindustrian</b>					
9.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Persen)	6,57%		7,15%		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
9.2	Pertumbuhan industri(Persen)	2.37%		2.43%		
9.3	Cakupan bina kelompok pengrajin (Persen)	13.75%	18.00%	16.50%	19.00%	
10	<b>Ketransmigrasian</b>					
10.1	Transmigrasi Swakarsa (Persen)	-		-		
10.2	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB ( Persen)		0,18		0,24	
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>						
<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>						
1	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>					
1.1	Persentase Desa Berstatus Swasemba terhadap Total Desa	30 Desa	30 Desa	30 Desa	30 Desa	
2	<b>Pertanian</b>					
2.1	NTP Pangan	87.54		91.79		Dinas Pertanian
2.2	NTP Hortikultura	104.43		105.68		Dinas Pertanian
2.3	Nilai tukar petani kebun	101.44	101.44	102.85	102.85	Dinas Perkebunan
2.4	NTP Perternakan	100		100	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.5	NTP perikanan		108.00		109.00	DKP

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA